



PERJANJIAN KINERJA

T A H U N 2 0 2 5

**KANTOR KESYAHBANDARAN DAN
OTORITAS PELABUHAN UTAMA
TANJUNG PRIOK**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Tap. MPR Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan agar setiap unit kerja instansi pemerintah mulai eselon II ke atas menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah menyelenggarakan Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Sebagai implementasi telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tahun 2025 yang diperlukan sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan dokumen yang memuat pernyataan pertanggungjawaban kinerja setiap pimpinan terhadap pimpinan yang di atasnya untuk mewujudkan target kinerja pada tahun yang bersangkutan. Perjanjian Kinerja juga merupakan pertanggungjawaban anggaran yang telah diterima dan anggaran tersebut akan dipergunakan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Pimpinan akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2025

KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN
OTORITAS PELABUHAN UTAMA
TANJUNG PRIOK



M. TAKWIM MASUKU
NIP. 196912101997031002



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA
TANJUNG PRIOK

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **M. TAKWIM MASUKU**
Jabatan : **KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc**
Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2025

PIHAK KEDUA
DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT

Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc
NIP. 19730808 199903 1 003

PIHAK PERTAMA
KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN
DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA
TANJUNG PRIOK



M. TAKWIM MASUKU
NIP. 19691210 19970 3 1002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1	SK.1	Meningkatnya Dukungan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Terhadap Konektivitas Transportasi Laut	IKK.3	Persentase Keteraturan Voyage Layanan Angkutan Tol Laut	%	100
			IKK.4	Persentase Keteraturan Voyage layanan Angkutan Ternak	%	100
2	SK.3	Meningkatnya Dukungan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Laut Terhadap Pelayanan Transportasi Laut	IKK.10	Terselenggaranya Angkutan Laut Lebaran serta Natal dan Tahun Baru	%	100
3	SK.4	Meningkatnya Dukungan bidang Kepelabuhanan terhadap Pelayanan Transportasi Laut	IKK.13	Tingkat Keandalan Peralatan Pendukung Operasional Bidang Kepelabuhanan	%	90
			IKK.15	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelabuhan Laut yang telah dilengkapi dokumen perencanaan	%	80
			IKK.16	Persentase Keandalan Fasilitas Pelabuhan	%	90
			IKK.17	Persentase Terlaksananya Pengerukan Alur / Kolam Pelabuhan	%	100
4	SK.5	Meningkatnya Dukungan Bidang Kenavigasian, Perkapalan dan Kepelautan, serta Penjagaan Laut dan Pantai terhadap Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut	IKK.19	Tingkat Keandalan Kapal Negara Patroli	%	100
5	SK.7	Meningkatnya Dukungan Manajemen terhadap Kualitas Tata Kelola Unit Kerja yang Baik	IKK.34	Persentase Pelaksanaan Layanan Perkantoran	%	100
6	SK.8	Meningkatnya Dukungan Teknis terhadap Kualitas Tata Kelola Unit Kerja yang Baik	IKK.35	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi SDM	%	100
			IKK.36	Terlaksananya Monev dan Pelaporan	%	100
			IKK.37	Persentase Kepatuhan Pelaporan Kinerja	%	100
			IKK.38	Terselenggaranya Kegiatan Pendukung	%	100
			IKK.39	Persentase pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak	%	100
			IKK.40	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	%	96
			IKK.41	Terselenggaranya Layanan Internal	%	100
			IKK.44	Persentase Penyelesaian Permohonan Layanan Rekomendasi Usaha Jasa Terkait	%	100
			IKK.46	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Standar Kinerja Operasional Pelabuhan yang telah ditetapkan	%	100

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		IKK.47 Persentase fasilitas perairan (penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, SBNP, dermaga, dan prasarana pendukung lainnya) yang disediakan sesuai dengan Masterplan Pelabuhan baik yang disediakan Penyelenggara Pelabuhan maupun Badan Usaha Pelabuhan	%	100
		IKK.48 Persentase fasilitas daratan (terminal, gudang, bunker, perkantoran, jaringan jalan, dan prasarana pendukung lainnya) yang disediakan sesuai dengan Masterplan Pelabuhan baik yang disediakan Penyelenggara Pelabuhan maupun Badan Usaha Pelabuhan	%	100
		IKK.51 Persentase pelayanan kapal yang menggunakan Sistem digitalisasi layanan angkutan laut	%	90
		IKK.52 Persentase Pelayanan kegiatan B/M barang yang menggunakan sistem digitalisasi layanan angkutan laut	%	100
		IKK.54 Persentase Penyelesaian Layanan Di Bidang Kelaiklautan Kapal	%	100
		IKK.55 Persentase Pengawasan pada Kunjungan Kapal berdasarkan Surat Persetujuan Masuk Kapal	%	100
		IKK.56 Jumlah Laporan Gelar Perkara Dugaan Tindak Pidana Pelayaran	Laporan	12
		IKK.57 Persentase terlaksananya kegiatan operasi patroli	%	100
		IKK.58 Persentase Pengawasan pada bongkar muat general cargo	%	100
		IKK.59 Persentase Pengawasan pada bongkar muat ternak	%	100
		IKK.60 Persentase Pengawasan pada bongkar muat barang curah cair	%	100
		IKK.61 Persentase Pengawasan pada bongkar muat barang curah kering	%	100
		IKK.62 Persentase Pengawasan pada bongkar muat peti kemas	%	100
		IKK.63 Persentase Pengawasan pada naik dan turun penumpang	%	100
		IKK.64 Persentase Pengawasan Kegiatan Pemanduan dan Penundaan	%	100
		IKK.65 Persentase Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)	%	100
		IKK.66 Persentase Penerbitan Surat Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan	%	100
		IKK.67 Persentase Pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran	%	100
		IKK.68 Tingkat penggunaan reception facilities di Pelabuhan	%	75

Kegiatan

1. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut
2. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut
3. Penunjang Teknis Transportasi Laut
4. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Laut

Anggaran

Rp. 4.842.601.000
Rp. 459.806.000
Rp. 7.129.540.000
Rp. 65.026.484.000

Disetujui
DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT

Dr. CAPT. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc
NIP. 19730808 199903 1 003

Jakarta, 02 Januari 2025
KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN
DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA
TANJUNG PRIOK



M. TAKWIM MASUKU
NIP. 19691210 19970 3 1002